

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah sebagai sub sistem dari keseluruhan system penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan starting point strategis, hal ini merupakan langkah logis karena didalam implementasinya penyusunan rencana pembangunan memerlukan integrasi dan akumulasi potensi sumberdaya maupun jejaring kerja (networking) antara pelaku pembangunan dan akan mewarnai pelaksanaan rencana pembangunan maupun pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh sebab itu dengan dikeluarkannya perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 maka menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun rencana strategis, yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD, sebagai implementasi dari kebijakan, program dan kegiatan pokok RPJMD dengan memperhatikan variabel penting Visi, Misi SKPD maupun tugas pokok dan fungsi yang secara yuridis merupakan amanat perda tentang organisasi SKPD.

Dengan demikian menjadi penting bahwa Renstra SKPD harus didesain dalam koridor integrasi dua dimensi kepentingan yang keduanya akan efektif untuk mencapai sasaran maupun perwujudan Visi dan Misi daerah sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021. Berkenaan dengan itu baik formula maupun proses penyusunan Renstra SKPD benar-benar mampu mendukung rencana pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana substansi RPJMD Kabupaten Lamongan, sehingga target kinerja yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai dan dipertanggungjawabkan.

Perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai bentuk upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Government) yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi, tentunya membawa pengaruh perubahan yang cukup signifikan di daerah. Terlebih pada

penataan kelembagaan dan organisasi yang berada di ruang lingkup dan kewenangan daerah.

Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2018 ini merupakan bagian dari Renstra SKPD maupun RKPD Kabupaten Lamongan. Tujuan disusunnya rencana kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah merupakan suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program pembangunan khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan.

Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Lamongan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk untuk unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan otonomi daerah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lamongan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Perencanaan sistem pencapaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang starting poin pada arah dan kebijakan bagi penghapusan KDRT berdasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan mensikapi paradigma yang berkembang selama ini, ternyata telah terjadi gap (kesenjangan) antara peran fasilitasi pemerintah dengan tuntutan masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan kesejahteraan.

Dalam Renstra SKPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tetap berpegang pada prinsip Tata Pemerintahan yang baik dan mencakup lima pendekatan sebagaimana yang

diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, antara lain :

1. Pendekatan Politik.
2. Pendekatan Teknokratik.
3. Pendekatan Partisipatif.
4. Pendekatan Top-Down.
5. Pendekatan Bottom-Up.

dengan lima pendekatan tersebut, Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, yang dibuat secara tahunan dan memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. setidaknya mampu mengimbangi langkah pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun kedepan (2016-2021), dan diharapkan mampu menghadapi persaingan global, pertumbuhan penduduk serta dinamika masyarakat yang berkembang, sebagaimana yang telah ditentukan arahnya oleh Bupati terpilih melalui Visi dan Misi, yang dituangkan secara berkesinambungan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dilandasi Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam
Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003, tentang
Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah.

16. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017

28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah sebagai upaya untuk merealisasikan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai wujud realisasi rencana kerja dari dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama Satu tahun kedepan, sehingga Out Put yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pembangunan, dengan demikian Renja SKPD menjadi tolak ukur realisasi pelaksanaan program kerja SKPD yang sudah tertuang dalam Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2018 terdiri dari beberapa Bab dan Beberapa Lampiran yang memuat program dan kegiatan serta target kinerja selama 1(satu) tahun kedepan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan tentang uraian mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD, Landasan Hukum, dan Sistematika penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, bab ini memuat tentang;
a) Evaluasi Pelaksanaan Renja (tahun n-1) kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Review hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan/realisasi APBD untuk SKPD. b) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. c) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. d) Review Terhadap Rancangan Awal RKPd dan, e) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, memuat tentang; a). Telaah terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, b). Telaahan Renstra, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. c). Tujuan dan Sasaran Renja SKPD yaitu memuat Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra SKPD,

Bab IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2011-2015) dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. Adapun jumlah program kegiatan pada tahun 2015 terdapat 14 program dan pada tahun 2016 terdapat 14 program kegiatan.

Dari hasil pencapaian program kegiatan tahun 2015 bisa dilihat bahwa capaian tersebut sudah berhasil dan tidak menemui kendala, sedangkan perkiraan capaian program kegiatan tahun 2016 diperkirakan bisa memenuhi target yang ada.

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran selama 5 tahun dimulai tahun 2016 – 2021, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lamongan telah menetapkan hal dimaksud pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021. Selanjutnya untuk mewujudkan capaian kinerja selama 1 tahun yakni pada tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lamongan mengambil langkah, yakni berupa kebijakan, program dan kegiatan sebagai pendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, dengan melihat tabel berikut :

Tabel. T-VI.C.6
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan
Kabupaten Lamongan

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014			9	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2015		12
					6	7	8=(7/6)		10=(5+7+9)	11	
	A.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
	1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Peningkatan kualitas kader dan pendidikan anak								
	1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Keikutsertaan dalam kongres anak dalam peringatan Hari Anak Nasional	340 Orang	140	55	55	100%	55	250	74%
	1	Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya evaluasi posyandu melalui pelatihan peningkatan SDM kader Posyandu	720 Orang	300	150	150	100%	150	600	83%

		2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan										
		2	Advokasi Dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Peningkatan jumlah pengusaha perempuan	800 Orang	195	45	45	100%	45	285	36%		
		2	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	Terwujudnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	50 Orang	50	25	25	100%	25	100	200%		
		2	Peningkatan pemahaman tentang gerakan sayang ibu	Meningkatkan Pemahaman tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI)	33 Kecamatan	29	27	27	100%	27	83	252%		
		2	Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Terwujudnya pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan Gender	375 orang	122	37	37	100%	37	196	52%		
		3	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Partisipasi LSM dan LSOM dalam pengarusutamaan Gender	50 LSOM	6	3	3	100%	3	12	24%		

			3	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	62 Desa	9	1	1	100%	1	11	18%
			3	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersedianya data terpilah Gender dan Anak	108 Kec.	54	27	27	100%	27	108	100%
			3	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan untuk perempuan								
			3	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Penurunan jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Pendampingan korban KDRT	400org Korban KDRT, 200 org untuk sosialisasi	120	95	95	100%	95	310	78%
			3	Sosialisasi dan Advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Terlaksananya program pemberdayaan perempuan pengembang ekonomi lokal	8 Kec.	2	1	1	100%	1	4	50%
			3	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	Peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja bagi Perempuan	1860 Orang	106	46	46	100%	46	198	11%

		4		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan									
		4		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Pelatihan kinerja bagi kader posyandu desa	445 Orang	60	60	60	100%	60	180	40%	
		4		Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Peningkatan keterampilan perempuan perkerja rumahan	120 Ibu	0	0	0	0%	0	0	0%	
		4		Kegiatan Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Meningkatnya kreatifitas perempuan	108 Kec	27	27	27	100%	27	81	75%	
		5		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Pelaksanaan Workshoop bagi pimpinan LSOM/LSM									
		5		Workshoop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Terselenggaranya Workshoop mengenai peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	300 Orang	80	0	0	100%	0	80	27%	

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1. Jenis Pelayanan Dasar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh SKPD yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
3. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Cakupan Indikator SPM dan Target Capaian Nasional bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Adapun Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional adalah sebagai berikut :

N	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai	
1	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas/terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	2016
2	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di Puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS	100 dari sasaran Program	2016
3	Rehabilitasi sosial bagi perempuan	3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yg diberikan oleh	75	2016

	dan anak korban kekerasan	petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 4. Cakupan layanan bimbingan rohani yg diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75	2016
4	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus terhadap perempuan dan anak 6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80 50	2016 2016
5	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50 100	2016 2016

3. Target Pencapaian SPM oleh SKPD bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Target pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Tahun 2014 (%)	Tahun 2015 (%)	Tahun 2016 (%)
		Indikator			
1	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas/ terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di Puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/ PKT di RS	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yg diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75	75	75
		2. Cakupan layanan bimbingan rohani yg diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak	75	75	75

		korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu			
4	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	<p>1. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus terhadap perempuan dan anak</p> <p>2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum</p>	80	80	80
			50	50	50
5	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	<p>1. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>2. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p>	50	50	50
			100	100	100

Tabel.T-VI.C.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lamongan Tahun 2010- 2015

				Target Renstra SKPD				Realisasi Pencapaian		Proyeksi		
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2014	Tahun 2015	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	SPM Pemerintah Kabupaten Lamongan											
A.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1.	Terselenggaranya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			2,09%	2,11%	2,13%	2,15%	4,36%	4,65%	2,13%	2,15%	
2.	Terpeliharanya angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas			99,68%	99,70%	99,75%	99,80%	99,86%	99,89%	99,75%	99,80%	
3.	Terselenggaranya partisipasi angkatan kerja perempuan			52,58%	53,42%	54,18%	55,08%	54,91%	55,08%	54,18%	55,08%	
4.	Tercapainya peningkatan peran perempuan dibidang ekonomi			7,75%	8,75%	9,75%	10,75%	8,95%	10,75%	9,75%	10,75%	
5.	Terpeliharanya rasio KDRT			0,062%	0,059%	0,056%	0,053%	0,043%	0,003%	0,056%	0,053%	
B.	Penanganan Pengaduan/ laporan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak											
1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
C.	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan anak korban Kekerasan											

1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
D.	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan											
1.	Cakupan layanan rehanbilitas sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%						100,00%	75,00%	75,00%	75,00%	
2.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%						0,00%	75,00%	75,00%	75,00%	
E.	Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan											
1.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%						100,00%	80,00%	80,00%	80,00%	
2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%						100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
F.	Pemulangan dan Registrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan											
1.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%						0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	

2.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%						0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
----	-----------------------------------------------------------------------------	------	--	--	--	--	--	-------	---------	---------	---------	--

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana kinerja dimaksud, digunakan instrumen pengukuran ordinal dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil.

Adapun skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

85 – 100	= Sangat Baik / Sangat berhasil
70 - < 85	= Baik / berhasil
55 - < 70	= Kurang Baik / kurang berhasil
< 55	= Sangat Kurang Baik / tidak berhasil

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan dan secara proporsional telah berjalan dengan baik. Akuntabilitas kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan dari penjabaran Visi, Misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana kinerja dimaksud, antara lain :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, bisa dilihat dari jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (10.746) di bagi dengan jumlah pekerja perempuan (479.465) dihasilkan pencapaian sebesar 2.24% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 2.15%. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai target RPJMD tahun 2015 dengan target 2,15% dengan capaian 2,24% hal ini merupakan wujud bahwa keberadaan wanita sudah diakui dan mempunyai peran dalam pembangunan pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas, bisa dilihat dari jumlah anak perempuan usia 15 th keatas yang melek huruf (545.254) dibagi dengan jumlah anak perempuan usia 15 th (545.415) dihasilkan

pencapaian sebesar 99.97% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 99.80%.

- Partisipasi angkatan kerja perempuan, bisa dilihat dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (264.424) dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan (479.465) dihasilkan pencapaian sebesar 55.15% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 55.08%.
- Peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi, bisa dilihat dari jumlah perempuan pengembang usaha ekonomi produktif (72.767) dibagi dengan jumlah perempuan (671.285) dihasilkan pencapaian sebesar 10.84% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 10.75%.
- Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa dilihat dari jumlah kasus KDRT yang terjadi setiap tahun (17) dibagi dengan jumlah perempuan (336.305) dihasilkan pencapaian sebesar 0.005% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 0.053% . Bidang Pemberdayaan Perempuan dapat menurunkan tingkat Rasio KDRT dan melampaui target dari target 0,053% berhasil mencapai 0,005% , hal ini merupakan wujud berhasilnya pemberian advokasi dan kesadaran untuk pelaporan dan pendamping bagi para korban KDRT.

Tabel

CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2016 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2016	REALISASI KINERJA Tahun 2016	% CAPAIAN KINERJA Tahun 2016	
1	2	3	4	5	6	
	Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan					
				5,14	100,9	
				11,37	11,87	104,4
				10	15	150
			40	40	100	

C Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SK

PD

1. Proses Perencanaan Pembangunan dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Daerah Kabupaten Lamongan, yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai hasil representasi Visi Bupati Terpilih, adalah:

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING”

Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menetapkan Visi:

“TERWUJUDNYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN KELUARGA BERKUALITAS“

Visi tersebut menggambarkan suatu niat baik dan ketulusan melalui semangat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang tumbuh seimbang merupakan salah satu prioritas pembangunan yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang stabil yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,0 per wanita atau *Net Reproduction Rate* (NRR) sama dengan 1. Dan mewujudkan keluarga lebih sejahtera atas anugerah yang diberikan Allah SWT, berupa keanekaragaman sumberdaya yang ditunjang dengan kualitas pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan berkembangnya perekonomian masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun Misi-Misi Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan

Masalah utama dalam pemberdayaan Perempuan adalah rendahnya Kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.

Pada kenyataannya masih banyak penduduk perempuan yang masih buta huruf disamping itu peluang perempuan di bidang ekonomi terutama untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah, demikian pula halnya akses terhadap sumberdaya ekonomi, informasi pasar, dan modal kerja sehingga tingkat pengangguran pada perempuan tentunya lebih tinggi dari pada laki-laki.

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini adalah :

- 1) Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan.
- 2) Masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.
- 3) Masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan public yang lebih luas.
- 4) Budaya patriarki yang selama ini berkembang telah memosisikan perempuan sebagai warga negara kelas dua yang mengalami bentuk diskriminasi baik dalam keluarga maupun masyarakat.
- 5) Posisi perempuan selama ini hanya menjadi sekedar obyek pembangunan, obyek tindak kekerasan dan pelecehan, selalu

kelebihan beban serta dilabelkan sebagai makhluk emosional, yang tidak rasional sehingga tidak akan berwibawa.

- 6) Adanya budaya permisif/ pengikisan nilai budaya dan moral yang merugikan kaum perempuan seperti pornografi, trafficking, kebebasan seksual, dan lain-lain.
- 7) Rendahnya kualitas hidup perempuan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pencapaian tujuan-tujuan MDGs (Millenium Development Goals) yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia.
- 8) Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak

Rendahnya Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Anak, banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data yang terpilah.

b. Masih Dijumpai Tingkat Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu tindakan melanggar Hak asasi Manusia. Meskipun telah disusun Rencana Aksi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten dan penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak namun kenyataannya masih dijumpai adanya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2015 di kabupaten Lamongan tercatat 35 kasus terdiri dari kasus kekerasan anak 30 dan kasus KDRT perempuan 5 .

c. Banyaknya Peraturan Perundang Undangan Yang Bias Gender

Peraturan Perundang-Undangan masih banyak yang bias Gender dan/ atau diskriminatif terhadap perempuan, sehingga pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender itu sendiri

belum maksimal dipahami, diselain itu Peraturan Perundang-Undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.

3. Dampak pencapaian dan keberhasilan Visi dan Misi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan diperlukan adanya suatu rumusan yang menjadi tonggak kunci penentu keberhasilan. Berdasarkan Analisis Internal maupun Eksternal rumusan Faktor Kunci penentu keberhasilan untuk mencapai Visi, Misi adalah, sebagai berikut:

- a. Menciptakan aparatur Pemerintah yang kompeten, kredibel, inovatif melalui peningkatan kapasitas SDM, peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.
- b. Membangun komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga
- c. Jumlah penduduk yang besar diimbangkan dengan peningkatan kualitas SDM adalah merupakan modal dasar pembangunan
- d. Pengelolaan sumberdaya alam dengan menerapkan teknologi guna mendukung perekonomian masyarakat.
- e. Karakter penduduk yang memiliki semangat kerja keras, gotong royong dan agamis sebagai modal dasar pembangunan.
- f. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan prima.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

- Analisis lingkungan internal
 - Kekuatan: Kekuatan yang dimaksud adalah aset yang dimiliki secara nyata sampai saat ini.
 - Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai, baik untuk kepentingan internal dan eksternal yaitu mitra kerja dan stakeholder.
 - Kemampuan mengelola sistem informasi manajemen.

- Analisis lingkungan eksternal
 - Tantangan :
 - Meningkatnya persaingan kompetensi SDM yang sangat ketat terutama penduduk usia produktif.
 - Masih besarnya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
 - Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima.
 - Pesatnya perkembangan teknologi yang merupakan tantangan bagi daerah apabila tidak mampu mengintroduksi dalam pengembangannya.
- 5. Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun depan.

1. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kondisi yang diharapkan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan tahun 2015 adalah :

- a. Tersedianya data terpilah tentang Gender dan Anak secara terinci
- b. Terbentuknya Focal Point dan Pokja PUG (Pengarusutamaan Gender) beserta Program Kerjanya dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dan adanya Rencana Aksi Daerah (RANDA)
- c. Peningkatan pengembangan SDM (sumber Daya Manusia) perempuan melalui P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera).

D Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

KODE	RKPD 2016	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
5	2	BELANJA LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	7.573.669.100	7.001.654.600		
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.713.669.100	4.799.980.000		
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	374.021.000	543.267.500		
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	5.000.000	
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.250.000	83.428.000	83.428.000	
01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000	15.000.000	
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000	32.700.000	32.700.000	
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000	30.000.000	42.250.000	
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	70.000.000	98.000.000	98.000.000	
01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.000.000	91.260.500	91.260.500	
01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	6.000.000	8.000.000	

01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan kebersihan, pengisian tabung kebakaran	3.500.000	10.000.000	10.000.000	
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat kabar	3.000.000	4.380.000	5.000.000	
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat-rapat dan tamu	60.000.000	70.000.000	78.000.000	
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan rapat koordinasi	30.000.000	50.000.000	90.000.000	
01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	Tersedianya biaya Honor untuk tenaga kontrak	16.271.000	53.499.000	83.620.000	
01	41	Rapat Kerja Daerah		Tersedianya Rapat Kerja Daerah			90.000.000	
01	42	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		Honorarium Tenaga Keamanan Kantor	8.000.000	2.000.000	25.350.000	
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana aparatur	1.246.558.100	3.621.712.500		
02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Peningkatan Pelayanan Alokon			413.000.000	
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	25.000.000	16.437.000	180.000.000	
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	99.110.000	159.000.000	42.000.000	
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	54.000.000	70.000.000	87.000.000	
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan rutin berkala Mobil Jabatan	30.000.000	30.000.000	70.000.000	
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas/ Operasional	92.980.000	98.000.000	98.000.000	
02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	20.000.000	26.000.000	
02	29	Pemeliharaan rutin / berkala meubelair	Pemeliharaan rutin / berkala meubelair	Pemeliharaan Meubelair	5.000.000	23.500.000	27.000.000	

05		Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	15.000.000	25.000.000		
05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pengiriman pendidikan dan latihan formal	15.000.000	25.000.000	30.000.000	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan keuangan	43.000.000	40.000.000		
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000.000	5.000.000	7.000.000	
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	6.000.000	5.000.000	7.000.000	
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	6.000.000	5.000.000	7.000.000	
06	05	Forum SKPD	Forum SKPD	Terwujudnya Koordinasi dalam Pengembangan Program SKPD	10.000.000	10.000.000	15.000.000	
06	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Terwujudnya Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	15.000.000	15.000.000	30.000.000	
15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Peningkatan kualitas kader dan pendidikan anak	230.000.000	150.000.000		
15	03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Partisipasi kongres anak dalam peringatan Hari Anak Nasional	35.000.000	25.000.000	35.000.000	
15	06	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kota layak anak pemberdayaan perempuan dan anak	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kota layak anak pemberdayaan perempuan dan anak	Terciptanya Kota Layak Anak (KLA)	120.000.000	100.000.000	70.000.000	
15	15	Evaluasi dan Pelaporan		Tersedianya Data yang Terkait dengan Kesetaraan Gender			25.000.000	

				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan	390.000.000	290.000.000		
16	01	Advokasi Dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Advokasi Dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Peningkatan Pengetahuan Perempuan dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender	20.000.000	15.000.000	25.000.000	
16	02	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Pendampingan Korban tindak kekerasan / KDRT	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
16	04	Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Terwujudnya pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan Gender	40.000.000	40.000.000	60.000.000	
16	05	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	peningkatan Peran aparat Pemerintah dalam Pengarusutamaan Gender	30.000.000	30.000.000	40.000.000	
16	06	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	140.000.000	140.000.000	170.000.000	
16	07	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Meningkatnya kuantitas pemahaman masyarakat tentang PUG	25.000.000	25.000.000	30.000.000	
16	08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersedianya data terpilah Gender dan Anak	60.000.000	0	50.000.000	
17		Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan untuk perempuan	395.000.000	70.000.000		
17	02	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Menurunnya jumlah kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	55.000.000	40.000.000	40.000.000	

17	05	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Sosialisasi dan Advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	tersedianya Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	40.000.000	0	30.000.000	
17	08	Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan	Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan	Terlaksananya fasilitasi perlindungan Perempuan	35.000.000	0	30.000.000	
17	10	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	peningkatan Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	150.000.000	30.000.000	150.000.000	
18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan	130.000.000	60.000.000		
18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		Peningkatan Peran Organisasi Perempuan dalam kegiatan kesetaraan Gender			30.000.000	
18	02	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Peningkatan kinerja Kader pada kegiatan kesetaraan dan Keadilan gender	30.000.000	20.000.000	30.000.000	
18	05	Kegiatan Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Kegiatan Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Pelaksanaan Pameran Hasil Karya Perempuan dalam Bidang Pembangunan	50.000.000	40.000.000	85.000.000	
19		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Pelaksanaan Workshop bagi pimpinan LSOM/LSM	30.000.000	-		
19	01	Workshoop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Workshoop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	30.000.000	-	50.000.000	

Program dan kegiatan seperti tabel diatas menunjukkan bahwa otoritas utama dalam menentukan program dan kegiatan berjalan adalah Bagian Pembangunan selaku Tim Satuan Tiga Bappeda dan DPPKA kab.

Lamongan . Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya sebagai perencana dan mengusulkan kegiatan yang sudah ada pada RKPD sehingga tidak semua program dan kegiatan yang diusulkan di setujui .

Penjelasan mengenai review antara RKPD dengan analisis kebutuhan sebagai berikut :

- a. Menentukan urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menunjang Program Prioritas Kabupaten Lamongan Tahun 2015 ;
- b. Menentukan program kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2015 sebagaimana terdapat dalam RPJMD Tahun 2015 ;
- c. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kabupaten Lamongan Tahun 2015 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan SKPD ;
- d. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- e. Mengidentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki *multiplayer effect* yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan.
- f. Mengidentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan.
- g. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat spesifik grant sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Seperti yang dilihat di tabel banyak program dan kegiatan akhirnya tidak disetujui baik dari program maupun kegiatannya ataupun jumlah anggaran yang diusulkan dan ada juga program dan kegiatan yang tidak diusulkan dimunculkan , semuanya disesuaikan dengan kebijakan dan target kabupaten lamongan.

E Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari Bidang Perencanaan dan keuangan yang kemudian di konsolidasikan kepada setiap bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Kerja (RAK) yang kemudian disetujui oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. RAK kemudian dikirim kepada Pemda Kabupaten Lamongan dan diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD 2015 dan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dalam RPJMD yang berhubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas.

Kedua kebijakan tersebut diambil untuk melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan **“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING”**, sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016- 2021.

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menetapkan Visi:

“TERWUJUDNYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN KELUARGA BERKUALITAS“

Visi tersebut menggambarkan suatu niat baik dan ketulusan melalui semangat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang tumbuh seimbang merupakan salah satu prioritas pembangunan yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang stabil yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,0 per wanita atau *Net Reproduction Rate* (NRR) sama dengan 1. Dan mewujudkan keluarga lebih sejahtera atas anugerah yang diberikan Allah SWT, berupa keanekaragaman sumberdaya yang ditunjang dengan kualitas pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan berkembangnya perekonomian masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun Misi-Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sejalan dengan kebijakan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menetapkan arah kebijakan-kebijakan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di segala sektor
2. Mengintensifkan upaya peningkatan peran serta perempuan dalam bidang pendidikan di seluruh sektor pembangunan.
3. Memfasilitasi pengembangan metode-metode pengajaran inklusif gender dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dan luar sekolah.
4. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.
5. Memberikan akses dan kesempatan lebih luas kepada anak perempuan dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan.
6. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas perempuan dalam berbagai kesempatan dan peluang ekonomi.
7. Mewujudkan 30% keterwakilan perempuan di bidang legeslatif.
8. Memantapkan pengarusutamaan gender di semua lembaga pemerintah (pusat, propinsi dan kabupaten kota).

Adapun program pembangunan pemerintah Kabupaten Lamongan, yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah :

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan.
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan.
- e. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.

B. Telaahan Renstra

Berdasarkan Misi yang telah diuraikan diatas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang juga sejalan dengan Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, maka ditetapkan Tujuan sebagai berikut :

1. Misi Satu : **Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sasaran SKPD merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik, perumusan sasaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya memperhatikan sasaran Pemerintah Daerah dalam RPJMD dan disesuaikan dengan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” dengan sasaran :
 - a. Peningkatan Pendampingan Kasus Kekerasan Pada Perempuan.
 - b. Peningkatan Pendampingan Kasus Kekerasan Pada Anak.
 - c. Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Ekonomi Produktif
 - d. Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2018**

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	RENCANA TAHUN 2018 (tahun rencana)				CATATAN PENTING (*)	Prakiraan maju Rencana Tahun 2019			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK									
2	2	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		638,000,000				648,000,000		
2	2	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang tersedia	Dinas PP dan PA	Materai @3000 125 lbr, Materai@60 00 240 lbr	2,000,000	APBD	@3000 125 lbr, @6000 240 lbr	2,000,000
2	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perkantoran yang terpenuhi	Dinas PP dan PA	2 rekening dan Tambah Daya Listrik	137,000,000	APBD	2 rekening dan Tambah Daya Listrik	137,000,000
2	2	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Komputer	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditingkatkan	Dinas PP dan PA	Jasa service 10 unit	40,000,000	APBD	Jasa service 15 unit	50,000,000

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	RENCANA TAHUN 2018 (tahun rencana)				CATATAN PENTING (*)	Prakiraan maju Rencana Tahun 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 2 1 6	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional (STNK)	Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Operasional yang terpenuhi	Dinas PP dan PA	Roda 2 -20 unit,Roda 4-2 unit	15,000,000	APBD		Roda 2 -20 unit,Roda 4-2 unit	15,000,000
2 2 1 0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	Dinas PP dan PA	46 jenis	90,000,000	APBD		46 jenis	90,000,000
2 2 1 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	Dinas PP dan PA	5 jenis cetakan, foto copy 60.000 Lembar	60,000,000	APBD		5 jenis cetakan, foto copy 60.000 Lembar	60,000,000
2 2 1 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan yang terpenuhi	Dinas PP dan PA	10 jenis	10,000,000	APBD		10 jenis	10,000,000
2 2 1 3	Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang terpenuhi	Dinas PP dan PA	29 jenis	10,000,000	APBD		29 jenis	10,000,000
2 2 1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelayanan Perkantoran yang meningkat	Dinas PP dan PA	12 Bulan	15,000,000	APBD		12 Bulan	15,000,000
2 2 1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pelayanan Perkantoran yang meningkat	Dinas PP dan PA	12 Bulan	25,000,000	APBD		12 Bulan	25,000,000
2 2 1 8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan biaya kordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terbayar	Dinas PP dan PA	12 Bulan	40,000,000	APBD		12 Bulan	40,000,000

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	RENCANA TAHUN 2018 (tahun rencana)				CATATAN PENTING (*)	Prakiraan maju Rencana Tahun 2019				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	2	1	1	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan	Jumlah tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan yang terbayar	Dinas PP dan PA	20 orang tenaga honorar, 2 orang kontrak bupati,	194,000,000	APBD		20 orang tenaga honorar, 2 orang kontrak bupati,	194,000,000
2	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi			1,195,000,000				945,000,000
2	2	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor	Dinas PP dan PA	10 Komputer, 5 Printer, AC ,Kamera, mesin Fax	275,000,000	APBD		10 Komputer, 5 Printer, AC ,Kamera, Mesin Fax	275,000,000
2	2	2	2	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang terawat secara rutin	Dinas PP dan PA	2 Gedung	150,000,000	APBD		2 Gedung	150,000,000
2	2	2	2	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terawat secara rutin	Dinas PP dan PA	1 Mobil dinas	30,000,000	APBD		1 Mobil dinas	30,000,000
2	2	2	2	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil operasional/kendaraan dinas	Jumlah mobil dinas/operasional yang terawat secara rutin	Dinas PP dan PA	2 Mobil dinas	40,000,000	APBD		2 Mobil dinas	40,000,000

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	RENCANA TAHUN 2018 (tahun rencana)				CATATAN PENTING (*)	Prakiraan maju Rencana Tahun 2019					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	2	2	2	5	Pemeliharaan Rutin/berkala Perengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Dinas PP dan PA	2 Gedung	60,000,000	APBD		2 Gedung	60,000,000
2	2	2	x		Pengadaan Meubelair kantor	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Dinas PP dan PA	1 paket	190,000,000	APBD		1 Paket	190,000,000
2	2	2	x		Rehap sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang representatif	Dinas PP dan PA	1 gedung	450,000,000	APBD		1 gedung	200,000,000
2	2	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			35,000,000				35,000,000
2	2	3	4		Pengadaan Pakaian Dinas/seragam	Jumlah Pelayanan Perkantoran yang ditingkatkan	Dinas PP dan PA	Batik Korpri 150.000 X 40 Buah, Seragam Olaraga Dinas 500.000 X 40 Buah	35,000,000	APBD		Batik Korpri 150.000 X 40 Buah, Seragam Olaraga Dinas 500.000 X 40 Buah	35,000,000
2	2	4			Pengadaan Kendaraan Operasional	Meningkatkan Pelayanan Aparatur			500,000,000				

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	RENCANA TAHUN 2018 (tahun rencana)				CATATAN PENTING (*)	Prakiraan maju Rencana Tahun 2019				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	2	4	x	Pengadaan Kendaraan Operasional	Jumlah Pelayanan Aparatur yang meningkat	Dinas PP dan PA	2 Mobil Dinas	500,000,000	APBD			
2	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Terpenuhinya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			45,000,000				45,000,000
2	2	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang terpenuhi	Dinas PP dan PA	12 Dokumen	5,000,000	APBD		12 Dokumen	5,000,000
2	2	6	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan-laporan Keuangan Semesteran yang terpenuhi	Dinas PP dan PA	2 Dokumen	5,000,000	APBD		2 Dokumen	5,000,000
2	2	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan-laporan Keuangan Akhir Tahun yang terpenuhi	Dinas PP dan PA	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,000,000
2	2	6	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	jumlah laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang terpenuhi	Dinas PP dan PA	5 Dokumen	30,000,000	APBD		5 Dokumen	30,000,000

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	RENCANA TAHUN 2018 (tahun rencana)				CATATAN PENTING (*)	Prakiraan maju Rencana Tahun 2019			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	2	1			495,000,000				745,000,000		
2	2	1									
2	2	1	1	Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan	Prosentase perempuan kepala keluarga yang aktif dalam kegiatan kesetaraan gender	Kab. Lamongan	4.9%	30,000,000	APBD	5.9%	30,000,000
2	2	1	4	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Adanya KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	Kab. Lamongan	6 Baliho	100,000,000	APBD	10 Baliho	160,000,000
2	2	1	5	Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Prosentase Partisipasi Organisasi wanita yang aktif dalam kegiatan kesetaraan Gender	Kab. Lamongan	4.9%	30,000,000	APBD	5.9%	30,000,000
2	2	1	7	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Pengarusutamaan Gender (PUG) Secara Rutin	Kab. Lamongan	100%	25,000,000	APBD	100%	25,000,000
2	2	1	8	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Prosentase Data terpilah Gender dan Anak yang tersusun	Kab. Lamongan	40%	50,000,000	APBD	50%	60,000,000

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	RENCANA TAHUN 2018 (tahun rencana)				CATATAN PENTING (*)	Prakiraan maju Rencana Tahun 2019			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	2	1 6	1 2	Pembentukan/Pembinaan Forum anak	Jumlah Forum Anak yang dibentuk	Kec Paciran, Pucuk,Sugio, Tikung, Deket	5 Kecamatan	130,000,000	APBD	10 Kecamatan	260,000,000
2	2	1 6	x	Penyusunan profil Gender dan anak	Jumlah Dokumen Profil Gender dan Anak yang tersusun	Kab. Lamongan	1 Dokumen	50,000,000	APBD	1 Dokumen	70,000,000
2	2	1 6	x	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan forum anak	Jumlah Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan forum anak yang terlasana	Kecamatan	5 Kecamatan	30,000,000	APBD	10 Kecamatan	60,000,000
2	2	1 6	x	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (APE)	Jumlah kegiatan APE (Anugrah Parahita Ekapraja) yang terlaksana	Kab. Lamongan	1 Kegiatan	50,000,000	APBD	1 Kegiatan	50,000,000
2	2	1 7		Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan perempuan dan anak			690,000,000			920,000,000
2	2	1 7	1	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	SDM Terlatih dalam Pelayanan Pendamping Korban Kekerasan	Kab. Lamongan	1 Kegiatan / 100 %	50,000,000	APBD	1 Kegiatan / 100 %	75,000,000

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	RENCANA TAHUN 2018 (tahun rencana)				CATATAN PENTING (*)	Prakiraan maju Rencana Tahun 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 2 1 7 2	Penyusunan sistem Perlindungan Bagi Perempuan (Sistem pencatatan dan Pelaporan, Sistem penanganan dan Penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan)	Adanya Sistem pencatatan, Pelaporan, Sistem penanganan dan Penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan	Kab. Lamongan	1 Kegiatan / 100 %	50,000,000	APBD		1 Kegiatan / 100 %	70,000,000
2 2 1 7 3	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Prosentase Pendampingan Kasus Kekerasan pada Perempuan	Kab. Lamongan	20	60,000,000	APBD		25	80,000,000
2 2 1 7 4	Advokasi dan KIE Tentang Perlindungan Perempuan	Jumlah kasus KDRT yang tertekan	Kab. Lamongan	1 Kegiatan / 100 %	75,000,000	APBD		1 Kegiatan / 100 %	75,000,000
2 2 1 7 5	Gerakan Aksi Anti Kekerasan dan Eksploitasi pada Anak	Sarasehan Guru BK dan Pemberian Bantuan 1000 buku pedoman anti kekerasan dan Eksploitasi	Kab. Lamongan	100 orang/ Lembaga Pendidikan Tk. SMP/MTs	100,000,000	APBD		100 orang/ Lembaga Pendidikan Tk. SMP/MTs	120,000,000
2 2 1 7 6	Bimbingan teknis sistem advokasi dan layanan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Jumlah SDM yang Mengikuti Bimtek	Kab. Lamongan	80 orang Stakeholder peserta (P2TP2A) / 100 %	75,000,000	APBD		80 orang Stakeholder peserta (P2TP2A) / 100 %	100,000,000

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	RENCANA TAHUN 2018 (tahun rencana)				CATATAN PENTING (*)	Prakiraan maju Rencana Tahun 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 2 1 7 7	Perlindungan Kapasitas P2TP2A dalam Memberikan Advokasi dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.	Terlaksananya Kegiatan P2TP2A (Prosentase Pendampingan Kasus Kekerasan pada Anak)	Kab. Lamongan	40	75,000,000	APBD		40	100,000,000
2 2 1 7 8	Pengembangan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah	Jumlah Kunjungan Rumah Korban dampak kekerasan pada perempuan dan Anak	Kab. Lamongan	50	30,000,000	APBD		1 Kegiatan / 100 %	50,000,000
2 2 1 7 9	Musda LPA dan Pembentukan Forum Perlindungan Anak	Terbentuknya pengurus dan gugus - gugus LPA	Kab. Lamongan	1 Kegiatan / 100 %	75,000,000	APBD		20 % (60 Anak anak jalanan / panti asuhan)	100,000,000
2 2 1 7 10	Sosialisasi Undang -undang Penyalahgunaan NAPZA dan Pornografi	Jumlah Anak Sekolah Tingkat SMP/ dan SMA yang mengikuti Sosialisasi	Kab. Lamongan	100 orang/100%	50,000,000	APBD		100 orang/100 %	75,000,000
2 2 1 7 11	Sosialisasi Pengaruh Globalisasi ICT (Information Communication and Technology) terhadap Tumbuh Kembang Anak	Jumlah Peserta yang ikut sosialisasi	Kab. Lamongan	100 orang/100%	50,000,000	APBD		100 orang/100 %	75,000,000

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	RENCANA TAHUN 2018 (tahun rencana)				CATATAN PENTING (*)	Prakiraan maju Rencana Tahun 2019					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	2	1	8										
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			985,000,000			1,270,000,000				
2	2	1	8	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Meningkatnya Peran Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender	Kab. Lamongan	1 Kegiatan 170 orang (2 hari)	80,000,000	APBD		1 Kegiatan 180 orang (2 hari)	90,000,000
2	2	2	8	2	Pendidikan dan pelatihan Peran serta Perempuan dalam Kesetaraan Gender	Peningkatan Peran Serta kader dalam kesetaraan Gender	Kab. Lamongan	81 Kader 1 Kegiatan	30,000,000	APBD		108 Kader 1 Kegiatan	40,000,000
2	2	3	8	3	Sosialisasi dan Advokasi kebijakan perlindungan tenaga Kerja Perempuan	Meningkatnya Kualitas Kemampuan Calon Tenaga Kerja perempuan	Kab. Lamongan	80 Orang calon Tenaga Kerja Perempuan 2 Hari	40,000,000	APBD		100 Orang calon Tenaga Kerja Perempuan 2 Hari	50,000,000
2	2	4	8	4	Sosialisasi dan Advokasi kebijakan perlindungan tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Kemampuan Calon Tenaga Kerja	Kab. Lamongan	80 Orang calon Tenaga Kerja 2 Hari	40,000,000	APBD		100 Orang calon Tenaga Kerja 2 Hari	50,000,000
2	2	5	8	5	Pameran Hasil Karya perempuan di Bidang pembangunan	Pameran Produk Unggulan	Kab. Lamongan	108 Peserta 2 Hari	100,000,000	APBD		135 Peserta 2 Hari	150,000,000

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	RENCANA TAHUN 2018 (tahun rencana)				CATATAN PENTING (*)	Prakiraan maju Rencana Tahun 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 2 1 8 6	Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kesejahteraan keluarga Miskin	Kab. Lamongan	40Keluarga (Rumah)	175,000,000	APBD		50Keluarga (Rumah)	210,000,000
2 2 1 8 7	Pembinaan Keluarga Tenaga Kerja Perempuan	Peningkatan Kualitas Pembinaan Keluarga Tenaga Kerja Perempuan	Kab. Lamongan	75 Orang Keluarga Tenaga Kerja Perempuan 2 Hari	35,000,000	APBD		100 Orang Keluarga Tenaga Kerja Perempuan 2 Hari	40,000,000
2 2 1 8 8	Bimbingan Manajemen Usaha Bgi Perempuan dalam Mengelola Usaha	Peningkatan Kualitas Perempuan Pekerja Rumahan	Kab. Lamongan	135 Orang 2 Hari	50,000,000	APBD		150 Orang 2 Hari	60,000,000
2 2 1 8 9	Sosialisasi Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Meningkatnya Peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Kab. Lamongan	160 Peserta 2 Hari	80,000,000	APBD		180 Peserta 2 Hari	90,000,000
2 2 1 8 0	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang Ekonomi Produktif	Terwujudnya Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja perempuan	Kab. Lamongan	80 Perempuan Muda	100,000,000	APBD		100 Perempuan Muda	130,000,000
2 2 1 8 1	Pengembangan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (GSI)	Mengaktifkan dan Meningkatkan Kualitas Kelompok Kerja Tetap dan Satgas GSI (Gerakan Sayang Ibu)	Kab. Lamongan	81 Peserta 2 Hari	50,000,000	APBD		81 Peserta 2 Hari	50,000,000

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KINERJA	RENCANA TAHUN 2018 (tahun rencana)				CATATAN PENTING (*)	Prkiraan maju Rencana Tahun 2019				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	2	1 8 2	1 2	Pendidikan dan pelatihan perempuan kepala keluarga (PEKKA)	Sosialisasi dan Pendataan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Kab. Lamongan	81 Kader 1 Kegiatan	50,000,000	APBD		100 Kader 1 Kegiatan	60,000,000
2	2	1 8 3	1 3	Pemberdayaan dan perlindungan Lansia	Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia	Kab. Lamongan	100 Lansia 1 Hari	50,000,000	APBD		125 Lansia 1 Hari	75,000,000
2	2	1 8 4	1 4	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Pekerja Rumahan	Terwujudnya Advokasi Pembinaan dan Pelatihan Kemampuan pekerja Rumahan	Kab. Lamongan	80 Pekerja Rumahan	25,000,000	APBD		100 Pekerja Rumahan	40,000,000
2	2	1 8 5	1 5	Monitoring dan Evaluasi	Adanya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bulanan	Kab. Lamongan	12 Laporan	30,000,000	APBD		12 Laporan	35,000,000
2	2	1 8 6	1 6	Fasilitasi, Sosialisasi dan Advokasi Keluarga Tenaga Kerja Perempuan	Pembentukan Kelompok Kerja Anggota Keluarga Tenaga Kerja Perempuan	Kab. Lamongan	10 kelompok	50,000,000	APBD		20 kelompok	100,000,000
JUMLAH								4,583,000,000				4,608,000,000

BAB IV

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamongan adalah merupakan program Kabupaten, fungsi Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, Renstra SKPD selaras dengan RPJMD Kabupaten Lamongan dan RPJMD Propinsi Jawa Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dipergunakan oleh Unit Kerja sebagai usulan program dan kegiatan guna mewujudkan tercapainya pembangunan di Kabupaten Lamongan sebagaimana Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2015 dengan menyesuaikan program Kabupaten berdasarkan kepentingan, tugas pokok dan fungsi SKPD.

Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2018 ini merupakan bagian dari Renstra SKPD maupun RKPD Kabupaten Lamongan. Tujuan disusunnya rencana kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah merupakan suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program pembangunan khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan.

Dari uraian yang kami sajikan mulai Bab I sampai dengan Bab IV dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan target Renstra untuk pembangunan lima tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
tahun 2017.

Lamongan, Januari 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN

Drg. FIDA NURAIDA, M.Kes

Pembina UtamaMuda

NIP. 19660219 199303 2 007